



WFH Bukan Hari Libur

■ Pemda DIY Matangkan Aturan Teknis Sistem Kerja dari Rumah untuk ASN

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) tengah mematangkan aturan teknis terkait penerapan sistem kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) dan langkah efisiensi bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan yang ditargetkan mulai dieksekusi pada Jumat pekan ini tersebut pelaksanaannya akan dibarengi dengan imbauan hari bebas kendaraan bermotor serta pengetatan perjalanan dinas.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, penerapan WFH akan mengacu pada karakteristik dan beban pelayanan publik dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Pemda DIY akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur batasan persentase kuota pegawai, sementara penentuan rincai personel yang WFH diserahkan kepada OPD terkait.

"Ya tetap kan kita lihat ya dari sisi yang Ngarsa Dalem (Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X) sampaikan. Kita akan melaksanakan itu, cuma nanti teknisnya akan kita lihat seperti yang saya sampaikan. Dari sisi kuota misalnya, apakah 50 persen-50 persen, misalnya begitu. Itu semua tergantung dari sisi OPD-nya, dalam aktivitasnya itu berapa persen me-

lakukan pelayanan publik," kata Made di kompleks Keopathan, Yogyakarta, Senin (6/4).

Pihaknya menegaskan bahwa penerapan WFH tetap menuntut profesionalitas dan kewajiban pelaporan. WFH bukan berarti ASN terlepas dari kewajiban operasional. Selain mengatur pola kerja operasional, Pemda DIY juga akan menghidupkan kembali budaya ramah lingkungan. Kebijakan WFH pada hari Jumat ini akan dikombinasikan dengan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor bagi ASN yang tetap mendapatkan jadwal bekerja di kantor (*work from office*).

Terkait proses adaptasi ASN terhadap kebijakan hari bebas kendaraan bermotor ini, Made memaklumi bahwa pelaksanaannya membutuhkan transisi dan tidak bisa instan.

Di luar efisiensi mobilitas harian, Pemda DIY juga melakukan pengetatan pada sektor belanja perjalanan dinas, termasuk penggunaan mobil dinas dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Pembatasan sebesar 50 persen akan lebih difokuskan pada biro-biro administratif yang tidak memiliki kewajiban teknis ke lapangan. Menjawab kekhawatiran terkait melemahnya kontrol kedisiplinan ASN saat menjalankan skema WFH, Made menekankan bahwa evaluasi

si kinerja ASN saat ini tidak lagi sekadar berpatokan kepada presensi fisik, melainkan pencapaian target dan *output* pekerjaan harian.

"Misalnya kita masuk setengah 8 pagi sampai jam 4 sore. Setengah 8 dia langsung mengambil pekerjaan. Banyak sebenarnya waktu-waktu yang kemudian kita harus introspeksi diri. Benar tidak, sekitar 8 jam kita kerja itu kita memang kerja? Atau, ada hal-hal lainnya? Nah, ini berarti kan setiap orang harus punya tanggung jawab kerjaan yang memang itu menjadi *output* harian. Dia seperti apa, menyelesaikan apa," pungkasnya.

Mulai Jumat

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerapkan skema WFH mulai Jumat mendatang. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berlaku bagi seluruh ASN. Sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik tetap beroperasi secara luring. Tak hanya itu, pejabat struktural eselon 2 dan 3 tidak mendapat jatah bekerja dari rumah demi memastikan roda pemerintahan dan koordinasi tetap berjalan optimal.

Selaras dengan itu, Pemkot Yogyakarta juga menyuntikkan kebijakan khusus berupa pembatasan kuota BBM harian bagi kendaraan plat merah. Kebijakan yang disebut Hasto dengan istilah "plafonisasi" tersebut, menjadi jurus tambahan untuk menekan pengeluaran APBD di sektor energi.

"Nah, plafonisasi ini tambahan khusus dari Kota Yogyakarta. Untuk mobil kita beri jatah 5 liter per hari, sementara sepeda motor 1 liter per hari. Untuk empat hari (kerja)," urainya. (han/aka)

WAJIB LAPORAN

- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mematangkan aturan teknis penerapan sistem kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) dan langkah efisiensi bagi aparatur sipil negara (ASN).
- Kebijakan yang ditargetkan mulai dieksekusi pada Jumat pekan ini tersebut pelaksanaannya akan dibarengi dengan imbauan hari bebas kendaraan bermotor serta pengetatan perjalanan dinas.
- Pemda menegaskan bahwa penerapan WFH tetap menuntut profesionalitas dan kewajiban pelaporan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man			

Yogyakarta, 21 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005